



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTARNO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **96509**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.585.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/140 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah Seluas 1700 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. Tanah Seluas 860 m² di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 2170 m² di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 905.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m²/200 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
6. Tanah Seluas 17895 m² di OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 766.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 427.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX 2 DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA LEXY B3F-F A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 313.150.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	279.302.385
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.943.452.385
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.943.452.385

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.